

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Renstra Kantor Ketahanan Pangan Kab. Temanggung 2013-2018 ini memuat isu-isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi kebijakan pembangunan ketahanan pangan, arah kebijakan pengelolaan keuangan SKPD, program prioritas pembangunan ketahanan pangan, dan indikator kinerja ketahanan pangan yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah, Renstra Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung merupakan pedoman dalam melaksanakan pembangunan ketahanan tahun 2013-2018 yang selanjutnya akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Ketahanan Pangan tahun 2013-2018.

Renstra Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung ini merupakan penjabaran RPJMD 2013-2018 Kabupaten Temanggung, yang disusun sesuai dengan visi daerah yaitu : "*Terwujudnya Temanggung Sebagai Daerah Agraris Berwawasan Lingkungan, Bermasyarakat Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera dengan Pemerintahan yang Bersih*" dan misi kepala daerah Kabupaten Temanggung, utamanya untuk mendukung terwujudnya misi 1, yaitu : "*Mewujudkan Peningkatan Pertanian Modern yang Berwawasan Lingkungan*";

Renstra Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 disusun melalui mekanisme perencanaan terpadu atas berbagai proses perencanaan pembangunan, secara demokratis-partisipatif, baik melalui mekanisme *Bottom Up planning*; dimana proses penyusunan Renstra memperhatikan aspirasi dan kebutuhan yang berkembang di masyarakat, maupun *Top Down planning* dimana proses penyusunan Renstra senantiasa bersinergi dan berkoordinasi dengan kebijakan pembangunan Ketahanan Pangan di atasnya, yaitu Renstra Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa

Tengah, maupun Renstra Badan Ketahanan Pangan dari Kementerian Pertanian.

Tahapan Penyusunan Renstra Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung 2013-2018 adalah sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan Renstra, meliputi:
  - a. Pembentukan Tim Penyusun Renstra Kantor Ketahanan Pangan Tahun 2013-2018
  - b. orientasi dan penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Renstra
  - c. penyiapan dan pengumpulan data dan informasi.
2. Penyusunan Rancangan Awal Renstrameliputi :
  - a. pengolahan data dan informasi,
  - b. analisis gambaran umum kondisi ketahanan pangan daerah,
  - c. telaah kebijakan Pembangunan Ketahanan Pangan daerah,
  - d. penyelarasan prioritas program pembangunan ketahanan pangan daerah dengan kebijakan keuangan daerah,
3. Penyusunan Rancangan Awal Renstra
4. Penyempurnaan Rancangan Awal Renstra

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan Hukum Penyusunan Renstra Kantor adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1345);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

- Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 157);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9); (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
  24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6 );
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
  27. Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26)
  29. Peraturan daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan jangkaMenengah Daerah kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung periode Tahun 2013 - 2018 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Temanggung dalam kerangka pencapaian Visi : *“Terwujudnya Temanggung Sebagai Daerah Agraris*

*Berwawasan Lingkungan, Bermasyarakat Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera dengan Pemerintahan yang Bersih”*

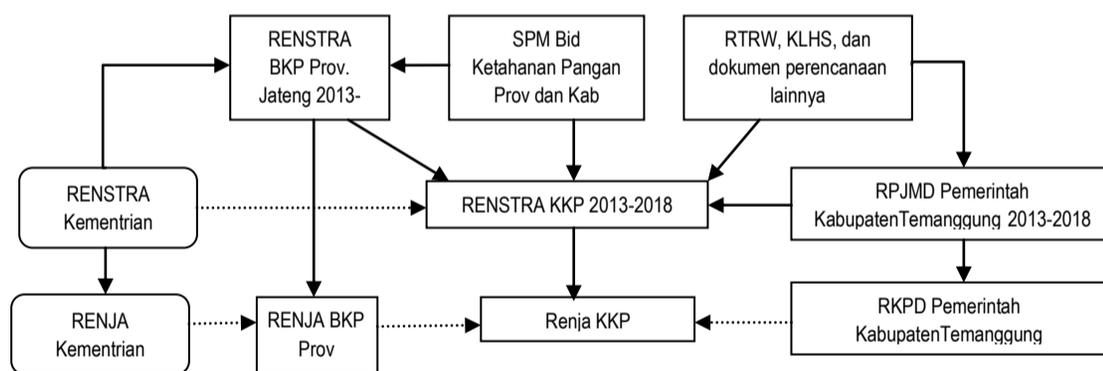
Tujuan disusunnya Renstra SKPD Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung untuk tahun 2013 - 2018 adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan Visi dan Misi Kantor Ketahanan Pangan, sehingga rencana program pembangunan peningkatan ketahanan pangan, yang telah ditetapkan dapat terwujud sesuai dengan visi dan misi, sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan;
2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan, penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Temanggung;
3. Menyelaraskan perencanaan program dengan rencana penganggaran;
4. Terwujudnya tolok ukur penilaian kinerja kebijakan dan program penyelenggaraan urusan katahanan pangan yang terukur selama 5 tahun yang akan datang.

#### 1.4 Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Keterkaitan antara dokumen Renstra Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung, RPJMD Pemerintah Kabupaten Temanggung, Renstra Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Renstra tingkat Badan Ketahanan Pangan lingkup Kementrian dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1. Keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan Ketahanan Pangan



## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan rencana Strategis Kantor Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Temanggung adalah :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KETAHANAN PANGAN DAERAH**

- 1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 1.3 Sumber Daya Kantor Ketahanan Pangan Daerah
- 1.4 Kinerja Pelayanan Kantor Ketahanan Pangan Daerah
- 1.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Ketahanan Pangan

### **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 1.3 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Ketahanan Pangan Daerah .
- 1.4 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 1.5 Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra Provinsi/Kabupaten
- 1.6 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 1.7 Penentuan Isu-isu Strategis

### **BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

- 4.1. Visi dan Misi
- 1.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Ketahanan Pangan Daerah
- 1.4 Strategi dan Kebijakan

### **BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

### **BAB VI. INDIKATOR KINERJA KANTOR KETAHANAN PANGAN DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

### **BAB VII. PENUTUP**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN SKPD

#### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung yang terbentuk atas dasar Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung.

Tugas pokok Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung adalah melaksanakan urusan wajib pemerintah daerah di bidang ketahanan pangan, dimana dalam penyelenggaraannya Kantor Ketahanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
- 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang ketahanan pangan;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang ketahanan pangan;
- 4) Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang ketahanan pangan;
- 5) Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan;
- 6) Penyelenggaraan ketatausahaan Kantor Ketahanan Pangan;
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Ketahanan Pangan memiliki 1 (satu) Sub-Bagian Tata Usaha dan 3 (tiga) Seksi, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

##### 1) *Sub Bagian Tata Usaha :*

Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Kantor meliputi penyusunan program, administrasi keuangan, pelayanan administrasi umum dan administrasi kepegawaian.

Fungsi :

- Pengelolaan urusan perencanaan dan pelaporan program;
- Penyusunan, pengolahan, dan pelayanan data;
- Pengelolaan urusan keuangan,
- Pengelolaan urusan umum dan kepegawaian,;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

2) *Seksi Ketersediaan dan Keamanan Pangan :*

Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Kantor di bidang ketersediaan dan keamanan pangan.

Fungsi :

- Pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal;
- Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan;
- Identifikasi cadangan pangan masyarakat;
- Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu;
- Pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat;
- Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi, dan keamanan pangan;
- Pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan;
- Penerapan Standart Batas Minimum Residu (BMR);
- Pelatihan inspektur, fasilitator, PPNS keamanan pangan;
- Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan;
- Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima;
- Pembinaan/fasilitasi Kredit Ketahanan Pangan; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

3) *Seksi Distribusi Pangan :*

Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Kantor di bidang Distribusi Pangan

Fungsi :

- Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan;
- Identifikasi kelompok rawan pangan;
- Identifikasi infrastruktur distribusi pangan;
- Pengembangan infrastruktur distribusi pangan;
- Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat

- penurunan akses pangan;
- Penyebarluasan informasi harga pangan;
- Pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

4) *Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan*

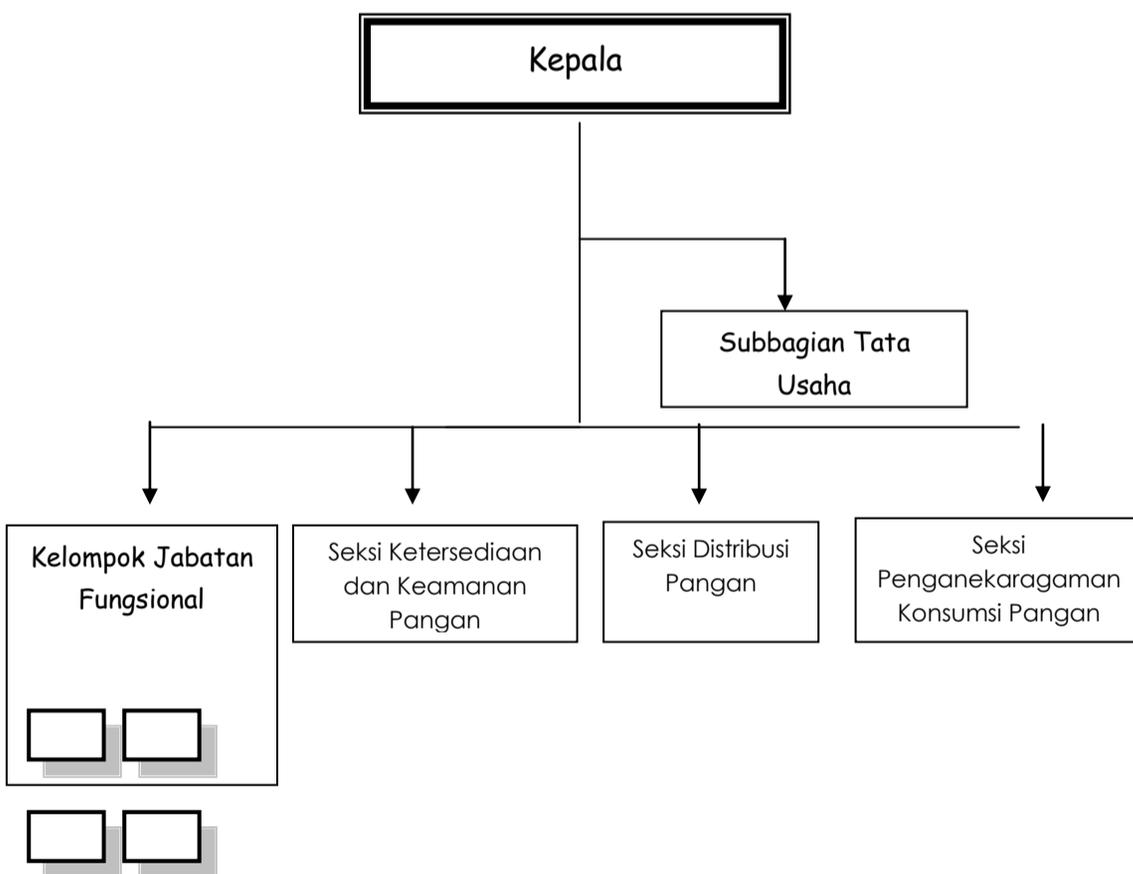
Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Kantor di Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Fungsi :

- Identifikasi potensi sumber daya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat;
- Pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan;
- lidentifikasi pangan pokok masyarakat;
- Peningkatan mutu konsumsi pangan masyarakat;
- Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat;
- Analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat;
- Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

Gambar 2. Struktur Organisasi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung



## 2.2 Sumber Daya SKPD

Sumber daya manusia (SDM) di Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung adalah 11 (sebelas) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang terdiri dari 1 orang Kasubbag Tata Usaha, 3 orang kepala seksi dan 7 orang staf. Posisi Kepala Kantor sampai dengan saat ini masih kosong, sejak Kepala Kantor Ketahanan Pangan yang lalu memasuki masa purna tugas awal Mei 2013. Komposisi dan rincian SDM Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung dapat dilihat dari berbagai macam tabel di bawah ini.

### 2.2.1. Kepegawaian

Tabel 1. Keadaan Pegawai Menurut Klasifikasi Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Org)	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pasca Sarjana	1	9.1
2	Sarjana	6	54.5
3	SLTA	4	36.4
	Jumlah	11	100

Sehingga berdasarkan Klasifikasi Pendidikan, Pegawai pada Kantor Ketahanan Pangan Daerah yang terbanyak adalah Sarjana.

Tabel 2. Keadaan Pegawai Menurut Klasifikasi Golongan

No	Golongan	Jumlah (Org)	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	IV	0	0
2	III	9	81.8
3	II	2	18.2
4	I	-	0
	Jumlah	11	100

Menurut klasifikasi Golongan, mayoritas Pegawai pada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung yang terbanyak adalah golongan III.

Tabel 3. Keadaan Pegawai Menurut Klasifikasi Eselonering

No	Eselonering	Terisi (Org)	Tidak Terisi(Org)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	III a	0	1
2	IV a	4	0
	<b>Jumlah</b>	<b>4</b>	<b>1</b>

Menurut klasifikasi eselonering, Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung terdiri atas 1 (satu) jabatan eselon III a untuk Posisi Kepala Kantor yang sampai saat ini belum diisi oleh pejabat definitif, dan 4 (empat) jabatan eselon IV a yang terdiri atas 1 (satu) kasubag TU dan 3 (tiga) kasi yang seluruhnya telah terisi.

### 2.2.2. Aset Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung

Tabel 4. Aset Gedung/Bangunan

NO	Rincian	Jumlah/buah
(1)	(2)	(3)
1	Gedung 200 m2 Kantor Ketahanan Pangan	200 m2
2	Pagar Teralis	1 unit
3	Kanopi Tempat Parkir	1 unit
4	Gudang Cadangan Pangan Pemda	1 unit
5	Lumbung Pangan (Getas)	1 unit

### 2.2.3. Aset Buku/Dokumen

Tabel 5. Aset Peralatan, Mesin, ekstrakomptabel, aset rusak, dan aset-aset lainnya

NO	Rincian	Nilai
(1)	(2)	(3)
1	Kendaraan Roda 4	163.963.032
2	Sepeda Motor Honda Mega Pro 08 AA 9901 NE	16.350.000
3	Sepeda Motor Suzuki Thunder 07 AA 9742 ME	14.450.000
4	Sepeda Motor Honda Supra 2005 AA 9771 KE	11.500.000
5	Meja Biro	1.050.000
6	Meja ½ biro	525.000
7	Meja Staf	600.000
8	Kursi Pimpinan	350.000
9	Kursi Kepala Seksi	350.000
10	Kursi Staf	400.000
11	Lemari Arsip Kayu	300.000

12	Meja ½ biro	525.000
13	Komputer	1.600.000
14	Laptop	6.500.000
15	Korden	1.700.000
16	Meja Kursi Tamu	3.212.000
17	Kursi Kerja Putar	350.000
18	Meja Kursi Kerja	3.960.000
19	Faximile	900.000
20	Printer	1.650.000
21	Meja ½ biro	500.000
22	Hand mixer	350.000
23	Cetakan kue	55.000
24	Gilingan mie	250.000
25	Olesan kue	15.000
26	Pisau roti	7.500
27	Pisau biasa	10.000
28	Oven	350.000
29	Mangkok kocok	10.000
30	Loyang cetakan kue	60.000
31	Loyang roti	100.000
32	Nampan roti	75.000
33	Kranjang peralatan	50.000
34	Timbangan kue	65.000
35	Wajan	102.500
36	Komputer intel core duo	14.287.000
37	Printer , meja modem intl	927.000
38	UPS/Stabiliser	1.490.500
39	Mesin ketik	1.975.000
40	Almari rak buku	3.725.000
41	Filling kabinet	3.950.000
42	Icd proyektor	4.480.000
43	Wireless	4.480.000
45	Proyektor screen (Lyar)	990.000
46	Meja Kursi Tamu	2.000.000
47	Kursi Hadap	950.000
48	Almari	197.500
49	Meja Kerja Eselon III	135.000
50	Komputer KP	8.400.000
51	Laptop Toshiba L 745	7.250.000
52	Camera Digital	2.750.000
53	Gordyn	3.000.000
54	Komputer rakitan	7.000.000
55	Printer	600.000
56	Komputer	7.000.000
57	Brankas	600.000
58	Kursi plastik	3.500.000
59	Flashdisk	210.000
60	Buku sejarah temanggung	66.500

### 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung adalah salah satu SKPD Pelaksana urusan wajib ketahanan pangan di Kabupaten Temanggung. Strategi pembangunan dilaksanakan melalui peningkatan ketahanan pangan dari aspek ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan yang didasarkan atas 4 (empat) jenis pelayanan dasar bidang ketahanan pangan menurut Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketahanan pangan, berdasarkan PERMENTAN No. 65/Permentan/ OT.140 / 12/10 tentang SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu :

- pelayanan di bidang ketersediaan dan cadangan pangan,
- distribusi dan akses pangan,
- penganeekaragaman dan keamanan pangan, serta
- penanganan kerawanan pangan,.

Tabel 6. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kantor Ketahanan Pangan Kab. Temanggung

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target-target SPM	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	18	19	20
1	Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita	90	Cakupan Ketersediaan Energi per kapita		2800	2850	2900	2940	2980									2847	2795
2	Penguatan Cadangan Pangan	60	Cakupan Ketersediaan Protein per kapita		73.54	74.00	74.75	75.50	75.99									74,99	70,88
3	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan akses Pangan di Daerah	90	Peningkatan cadangan Pangan masyarakat		43	51	59	67	75									29	35
4	Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	90	Presentase penguatan cadangan pangan pemerintah		10	10	10	10	10									2,60	8,8
5	Skor Pola Pangan Harapan	90	Cakupan Penanganan Kerawanan Pangan		60	60	75	75	85									50	50
6	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	80	Presentase meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan		89	90	90.45	90.85	91									88	88,5
7	Penanganan Daerah Rawan Pangan	60	Cakupan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan		60	80	80	85	90									-	-
			Besaran Desa Mandiri Pangan		8	9	9	10	10									6	8
			Besaran Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan		3	4	4	5	5									-	2
			Persentase Ketersediaan Informasi pasokan, harga dan akses pangan		70	90	95	100	100									66,67	66,67

### **2.3.1. Pelayanan Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan**

Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi seluruh penduduk Temanggung, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari 3 (tiga) sumber, yaitu ;

- Produksi sendiri (domestik kabupaten)
- Pasokan pangan dari luar daerah
- Pengelolaan cadangan pangan

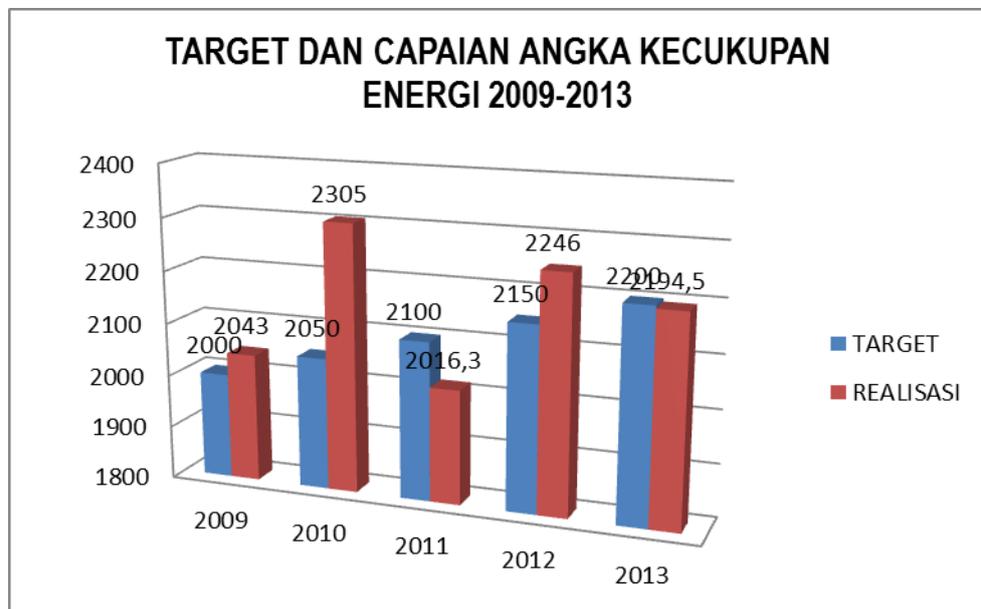
Tingkat Ketersediaan dan cadangan Pangan dapat diukur dari indikator-indikator kinerja kunci (IKK) berupa cakupan ketersediaan energi per kapita, cakupan ketersediaan protein per kapita, peningkatan cadangan pangan masyarakat, persentase penguatan cadangan pangan pemerintah.

#### **2.3.1.1 Cakupan Ketersediaan Energi per Kapita**

Ketersediaan energi per kapita minimal adalah 2200 kkal/kap/hr, sementara cakupan ketersediaan energi per kapita tahun 2012 adalah sebesar 2847 kkal/kap/hr dan 2795 gr/kap/hr. Dengan jumlah penduduk 733.418 jiwa (2012), capaian ketersediaan energi di Kabupaten Temanggung didukung oleh potensi agraris Temanggung sebagai penghasil komoditas pertanian, utamanya pangan pokok, yaitu padi dan jagung. Produksi Padi Temanggung mencapai 159.689,10 ton/tahun, dan jagung sebanyak 139.394,70 ton/tahun (*Temanggung dalam angka 2013*). Ketela pohon, ketela rambat, talas, kentang, kerut, sukun, ganyong, dan berbagai pangan sumber karbohidrat lain juga memberikan andil dalam suplai energi bagi masyarakat Temanggung, meskipun tidak dikonsumsi sebagai makanan pokok. Namun demikian kandungan utama karbohidrat yang terdapat dalam bahan pangan tersebut potensial menjadi sumber energi yang layak diperhitungkan dan dikembangkan,

sebagai alternatif pangan sumber energi guna mengimbangi peningkatan kebutuhan pangan akibat pertumbuhan penduduk, penurunan luasan lahan produksi pangan, serta penurunan daya dukung lingkungan. Dengan memperhitungkan beberapa faktor seperti potensi pangan yang ada, pertumbuhan penduduk, dan beberapa faktor lainnya, Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung menargetkan capaian ketersediaan energi sebesar 2980 kkal/kap/hr di akhir periode Renstra 2013-2018.

Berikut merupakan gambaran target dan capaian angka kecukupan energi periode Renstra 2009-2013 yang lalu



#### 2.3.1.2 Cakupan Ketersediaan Protein per Kapita,

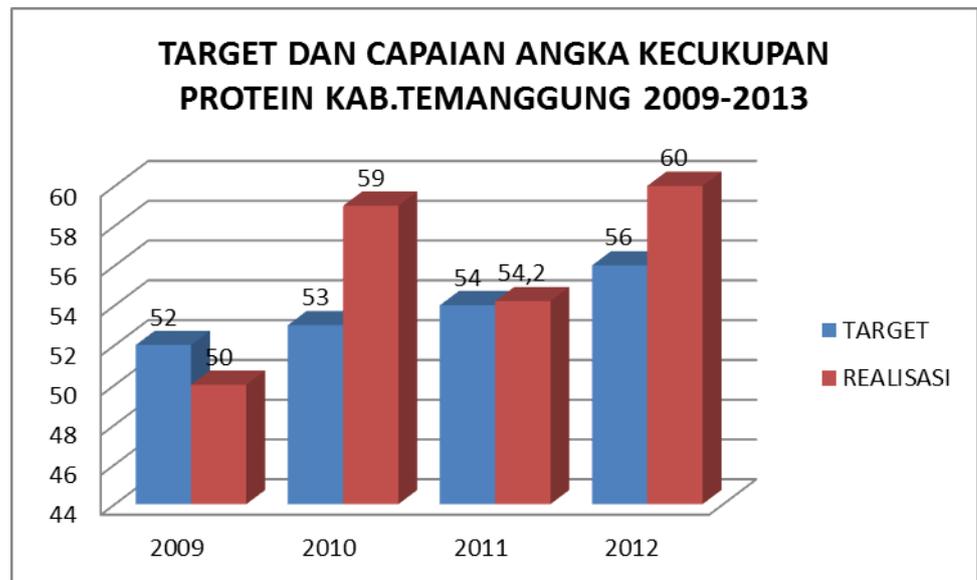
Cakupan Ketersediaan Protein per Kapita menunjukkan ketersediaan total protein dari sumber nabati maupun hewani. Angka ketersediaan minimal untuk kecukupan protein adalah 57 gr/kap/hr.

Capaian angka ketersediaan protein di Kabupaten Temanggung tahun 2012 mencapai 74.99 gr/kap/hr, dan 70.88 gr/kap/hr di tahun 2013. Capaian ini utamanya didukung oleh potensi bidang peternakan dan perikanan, dimana produksi daging dari ternak besar mencapai 720 ton, ternak kecil 301.95 ton, unggas

5559,55 ton, produksi telur baik ayam ras, ayam kampung, itik dan puyuh, serta susu sebanyak 730.256 liter (*Temanggung dalam angka 2013*).

Selain sumber protein hewani, protein juga dapat diperoleh dari sumber-sumber nabati, seperti kacang-kacangan, serta buah dan biji berminyak.

Berikut merupakan gambaran target dan capaian angka kecukupan protein dalam periode Renstra 2009-2013 yang lalu :



### 2.3.1.3 Peningkatan Cadangan Pangan Masyarakat,

Peningkatan cadangan pangan masyarakat diupayakan melalui pemberdayaan kelompok-kelompok lumbung pangan yang ada di seluruh wilayah Kab.Temanggung melalui kegiatan pemberdayaan lumbung pangan desa, yang telah kontinyu dilaksanakan sejak 2010. Sampai dengan akhir periode Renstra 2008-2013, telah dilaksanakan pembinaan dan pengembangan sebanyak 30 unit. Dengan pelaksanaan rutin selama 5 tahun, diharapkan terlaksana pembinaan dan pengembangan kelompok lumbung sebanyak 75 kelompok di akhir periode renstra, tahun 2018.

Kelembagaan pangan yang telah mendapatkan pembinaan sampai dengan akhir periode renstra 2008-2013 adalah sebagai berikut :

- a) Gapoktan Ngudi Lestari- desa Congkrang Kec.Bejen;
- b) Gapoktan Gotongroyong, Desa Tepusen,Kec.Kaloran;
- c) KWT Sumber Rejeki, Desa Ngimbrang-Kec.Bulu;
- d) Gapoktan Rekso Boga-Kelurahan Walitelon Utara, Kec.Temanggung;
- e) KWT Maju Lestari, Desa Batusari-Kec.Candiroto;
- f) KWT.Pertiwi, Ds.Wadas, Kec. Kandangan;
- g) Gapoktan Lumbung Pangan Mekarsari Ds.Danurejo-Kec.Kedu;
- h) KWT.Teratai, Ds.Tawang Sari, Kec.Tembarak;
- i) Gapoktan Asmamau Ds.Nguwet,Kec.Pringsurat;
- j) Gapoktan Sidomakmur I Desa Karangwuni Kec.Pringsurat;
- k) KT.Bumi Makmur Ds.Bumiayu Kec.Selopampang;
- l) KWT Sakura Ds.Kalibanger Kec.Gemawang;
- m) KT.Ngudimakmur Ds.Lempuyang Kec.Candiroto;
- n) KT.Budi Lestari IV Ds.Katekan Kec.Ngadirejo;
- o) KT.Bina Tani Ds.Tegowanuh Kec.Kaloran;
- p) KWT. Ngudi Makmur Ds. Tlogo-Kecamatan Tretep.;
- q) KT.Tani Mulyo Ds.Kentengsari Kec.Candiroto;
- r) KT.Kuat Ds.Plumbon Kec.Selopampang;
- s) KT.Argotani Ds.Candisari Kec.Bansari;
- t) KT.Tarumartani, Ds. Tanurejo-kec.bansari;
- u) KT.Ngudimakmur Ds.Medari kec.Ngadirejo;
- v) Lumbung Karya Husada Boga Ds.Semen Kec.Wonoboyo;
- w) KT.Gemahripah Ds.Gambasan Kec.Selopampang;
- x) KT.Taruna Bumi Kel.Jampirejo Kel.Temanggung;
- y) Kelompok Lumbung Lestari, Desa Rejosari Kec.Pringsurat;
- z) KWT Ngudimakmur, Ds. Mento-Kec. Candiroto;

- aa) KT. Ngudi Rahayu, Ds.Tening-Kec.Wonoboyo;
- bb) KT Makmur II Ds. Wonokerso.Kec. Tembarak;
- cc) KT.Tani Makmur, Ds. Caruban,Kec.Kandangan;
- dd) KT.Sidomukti, Ds.Gandulan, Kec. Kaloran.

#### *2.3.1.4 Persentase Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah,*

Cadangan Pangan Pemerintah untuk Kabupaten Temanggung tersedia dari alokasi cadangan pangan yang ada di BULOG, cadangan pangan pemerintah yang dialokasikan dari BPCP, maupun cadangan pangan yang dikelola pemerintah daerah Kabupaten Temanggung sendiri, yaitu Gudang Cadangan Pemerintah "TUGUR", yang berlokasi di Kelurahan Kertosari-Temanggung.

Alokasi pengisian Gudang Cadangan pangan yang dibangun dari dana DAK Pertanian tahun 2011 tersebut mulai dilaksanakan sejak 2012, dan ditargetkan untuk secara rutin diisi sejumlah 10 ton beras per tahun sampai tahun 2018, guna mengantisipasi potensi kerawanan pangan.

#### *2.3.1.5 Besaran Desa Mandiri Pangan,*

Desa Mandiri Pangan di Kabupaten Temanggung diupayakan melalui Program Aksi Desa Mandiri Pangan di 8 desa, yaitu desa Getas, Kec.Kaloran, Desa Pagergunung, Kec. Pringsurat, Desa Purwodadi Kec.Tembarak, Ds.Purwosari Kec.Wonoboyo, Desa Ngaditirto Kecamatan Selopampang, Desa Pendowo, Kec.Kranggan, dan Desa Kalimanggis dan Ds. Kaloaran Kecamatan Kaloran, sampai dengan akhir Tahun 2013.

Diharapkan, melalui bantuan keuangan yang dikelola Lembaga Keuangan Desa (LKD), pemberdayaan kelompok-kelompok afinitas untuk berusaha meningkatkan ketahanan pangan desa melalui kegiatan-kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan dalam menunjang ketersediaan pangan, pengolahan pangan dan peningkatan distribusi/akses pangan masyarakat untuk

menunjang kemandirian pangan desa yang bersangkutan dapat terfasilitasi secara maksimal.

### **2.3.2. Distribusi dan Akses Pangan**

Distribusi Pangan berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien, sebagai prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan yang cukup dalam jumlah maupun kualitas secara berkelanjutan, sangat sulit diwujudkan, mengingat masih ada sebagian masyarakat yang tidak mampu mengakses pangan akibat berbagai faktor, diantaranya faktor kemiskinan.

Indikator kinerja bidang Distribusi dan akses pangan adalah ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan, yang ditargetkan tercapai sebesar 100% di tahun 2018. Pemantauan harga telah dilaksanakan secara rutin oleh enumerator harga sejak 2010, namun demikian, ketersediaan data pasokan masih perlu diupayakan.

Upaya peningkatan distribusi dan akses pangan masyarakat juga diupayakan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung melalui berbagai kegiatan, diantaranya melalui kegiatan LDPM yang salah satu tujuannya adalah membantu stabilitas harga gabah petani, utamanya saat panen raya, dimana harga gabah cenderung anjlok dan saat paceklik. Dimana harga gabah menjadi tinggi. Kegiatan LDPM di Kabupaten Temanggung telah dilaksanakan sejak 2009 di 5 lokasi sebagai berikut :

- Gapoktan Tani Makmur - Danurejo (Kedu),
- Gapoktan Karya Tani - Kebumen (Pringsurat),
- Gapoktan Rejo Tani Jampirejo (Temanggung),
- Gapoktan Subur Makmur - Traji (Parakan),
- Gapoktan Sedyo Tani Makmur -Muntung (Candiroto)

Selain kegiatan tersebut, dilaksanakan pula kegiatan penunjang distribusi pangan dan fasilitasi akses pangan masyarakat sejak tahun

2009 dengan rincian sebagai berikut :

*Tabel. 7. Alokasi Anggaran untuk kegiatan distribusi dan fasilitasi Akses Pangan*

Tahun	Kegiatan	Alokasi Anggaran	Sumber dana
(1)	(2)	(3)	(4)
2009	Penyaluran Cadangan Beras pemerintah	3.610.000	APBD Kab
2010	Penggunaan cadangan Beras Pemerintah	3.910.000	APBD Kab
2011	Penggunaan cadangan Beras Pemerintah	5.000.000	APBD Kab
2012	Penggunaan cadangan beras pemerintah dan fasilitasi akses pangan	6.996.500	APBD Kab
2013	Penggunaan cadangan beras pemerintah dan fasilitasi akses pangan	24.527.700	APBD Kab

### **2.3.3. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan**

Pembangunan bidang konsumsi pangan diupayakan melalui peningkatan penganekaragaman dan keamanan pangan, yang diindikasikan dengan capaian skor pola pangan harapan (PPH), cakupan pengawasan dan pembinaan kerawanan pangan, serta besaran percepatan penganekaragaman konsumsi pangan.

#### *2.3.3.1 Capaian Skor Pola Pangan Harapan*

Pembangunan di bidang konsumsi pangan bertujuan untuk membangun suatu pola konsumsi pangan yang ideal, yaitu pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA). Penganekaragaman konsumsi juga diharapkan dapat memecah konsentrasi kebutuhan pangan, yang semula bertumpu pada komoditas sereal (beras dan gandum), menjadi suatu pola konsumsi beragam, yang disamping memberikan manfaat lebih dari sisi kesehatan, juga memberikan kesempatan berkembangnya komoditas-komoditas pangan lokal di Kabupaten Temanggung.

Capaian skor Pola Pangan harapan (PPH) untuk Kabupaten/Kota menurut SPM ditargetkan sebesar 90% di tahun 2015. Capaian PPH Kabupaten Temanggung di tahun 2013 adalah 88,5, dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 8. Hasil Perhitungan PPh Kabupaten Temanggung Tahun 2013

No	Kelompok Pangan	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
		Kalori	%	% AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1.	Padi-padian	916.8	41.8	<b>45.8</b>	0,5	20.9	22.9	25,0	<b>22.9</b>
2.	Umbi-umbian	294.6	13.4	<b>14.7</b>	0,5	6.7	7.4	2,5	<b>2.5</b>
3.	Pangan Hewani	152.5	6.9	<b>7.6</b>	2,0	13.9	15.2	24,0	<b>15.2</b>
4.	Minyak dan Lemak	325.3	14.8	<b>16.3</b>	0,5	7.4	8.1	5,0	<b>5.0</b>
5.	Buah/Biji Berminyak	14.8	0.7	<b>0.7</b>	0,5	0.3	0.4	1,0	<b>0.4</b>
6.	Kacang-kacangan	170.1	7.8	<b>8.5</b>	2,0	15.5	17.0	10,0	<b>10.0</b>
7.	Gula	144.9	6.6	<b>7.2</b>	0,5	3.3	3.6	2,5	<b>2.5</b>
8.	Sayur dan Buah	169.4	7.7	<b>8.5</b>	5,0	38.6	42.4	30,0	<b>30.0</b>
9.	Lain-lain	6.1	0.3	<b>0.3</b>	0,0	0.0	0.0	0,0	<b>0.0</b>
<b>Total</b>		<b>2194.5</b>	<b>100,0</b>	<b>109.7</b>	<b>11,5</b>	<b>106.7</b>	<b>117.0</b>	<b>100,0</b>	<b>88,5</b>

= AKE std : 2000 kkal/kap/hr

Kurangnya skor pada konsumsi pangan hewani diakibatkan karena tingginya harga daging (utamanya daging kambing dan sapi), yang jauh dari jangkauan masyarakat untuk dikonsumsi sehari-hari, sehingga frekuensi konsumsinya masih sedikit. Diharapkan, dengan kegiatan-kegiatan pemanfaatan pekarangan, bantuan dan pelatihan pengolahan pangan lokal, serta rangkaian pemberdayaan pangan lokal melalui ajang kreasi lomba cipta menu, promosi pangan lokal dalam event pasar murah, aneka pameran/expo, serta gerakan konsumsi pangan lokal, skor PPH dapat mencapai target baik sesuai SPM sebesar 2015, maupun 91 di akhir periode renstra tahun 2018.

Dalam periode Renstra 2008-2013, Skor PPH masyarakat Temanggung berdasarkan survey berangsur-angsur naik, dari 84,6 di tahun 2010, 86 di tahun 2011, 88 di tahun 2012, dan 88.5 di tahun 2013.

### *2.3.3.2 Cakupan Pengawasan dan Pembinaan Kerawanan Pangan*

Pola konsumsi pangan ideal adalah beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA), sehingga masalah keamanan pangan menjadi hal penting untuk diperhatikan. Keamanan pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan manusia.

Keberhasilan rangkaian pembangunan bidang keamanan pangan diindikasikan dengan jumlah sampel aman pada produk-produk pangan yang dipantau. Tingkat keamanan pangan menurut target SPM bagi Kabupaten/Kota yang ditetapkan adalah 80% sampel aman pada tahun 2015, yang diupayakan melalui berbagai kegiatan sosialisasi/pembinaan mutu dan keamanan pangan pada produsen pangan, kantin sekolah, serta pemantauan produk pangan yang beredar di masyarakat.

### *2.3.3.3 Besaran Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan*

Besaran Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan menunjukkan volume kegiatan penganekaragaman konsumsi pangan. Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung telah merintis pelaksanaan kegiatan ini sejak tahun dengan kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan, dengan sasaran kelompok wanita (ibu rumah tangga) sebagai ujung tombak ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Diharapkan tahun 2014 dilaksanakan 3 titik sasaran, 2015 dan 2016 di 4 lokasi, dan 2017-2018 dilaksanakan di 5 lokasi sasaran. Dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut, percepatan penganekaragaman konsumsi pangan menuju konsumsi pangan ideal yang Beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) di Kabupaten Temanggung dapat terwujud.

## **2.3.4. Penanganan Daerah Rawan Pangan**

Berdasarkan indikator-indikator dalam peta kerentanan dan ketahanan pangan (FSVA), yang merupakan akumulasi dari aspek ketahanan pangan yaitu ketersediaan pangan, akses maupun pemanfaatan pangan, diperoleh bahwa indeks ketahanan pangan tiap kecamatan di Kabupaten Temanggung adalah 0,05-0,09, yang berarti berada pada prioritas 6 (indeks 1-6) dalam penanganan kerawanan pangan kronis (terstruktur).

Namun demikian, potensi kerawanan pangan transien masih ada, antara lain melalui kejadian kasuistis seperti gagal panen, bencana alam, maupun bencana lain seperti kebakaran, dan lain-lain.

Guna mengantisipasi kerawanan pangan, Kantor Ketahanan pangan melalui kegiatan Pengisian Lumbung Pangan sebagai antisipasi Kerawanan Pangan juga menyediakan beras di Gudang cadangan Pangan Pemerintah "TUGUR" -yang berdiri tahun 2011 dari dana DAK Pertanian-, yang dapat dimanfaatkan sewaktu-waktu untuk menangani kerawanan pangan.

Pengalokasian anggaran untuk pengisian Gudang Cadangan Pangan Pemerintah "TUGUR" telah rutin dilaksanakan sejak Tahun 2012. Tahun 2012

Diharapkan, dengan pengisian rutin sebesar 10 ton beras setiap tahun selama periode Renstra 2013-2018 ini, Kabupaten Temanggung memiliki kesiapan yang cukup dalam penanganan potensi kerawanan.

Berdasarkan anggaran dan realisasi pendanaan dalam rangka pelayanan bidang Ketahanan Pangan di Kabupaten Temanggung selama 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 9. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung

Uraian	Anggaran pada tahun ke (Rp)					Realisasi anggaran pada tahun ke (Rp)					Rasio antara realisasi dan anggaran pada tahun ke (%)					Rata-Rata pertumbuhan (%)	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pendanaan untuk Pelaksanaan urusan Ketahanan Pangan	507.834.500	396.399.625	381.956.200	676.659.300	622.395.400	507.834.500	371.987.718	359.684.474	629.556.843	340.366.784	100	93,84	94,17	93,04	54,69	10,89	-12,01

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD**

### **2.4.1. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD**

Tantangan dan dihadapi dalam upaya membangun ketahanan pangan di Daerah Kabupaten Temanggung :

1. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung yang masih cukup tinggi, memerlukan perhatian khususnya untuk mencukupi kebutuhan pangan
2. Ancaman terhadap produksi pangan, terkait alih fungsi lahan maupun menurunnya daya dukung lingkungan akibat perubahan iklim global, serta bencana alam dan serangan hama penyakit perlu diantisipasi
3. Potensi lahan pekarangan sebagai penunjang pemenuhan pangan di tingkat rumah tangga belum dimanfaatkan secara optimal
4. Temanggung sebagai wilayah agraris yang kaya akan potensi pangan lokal merupakan aset pengembangan ketahanan pangan
5. Tingkat pendidikan masyarakat, dalam korelasinya dengan pemahaman akan pentingnya pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman menjadi peluang sekaligus tantangan dalam pengembangan pola konsumsi masyarakat.
6. Meningkatnya harga beras, menyempitnya areal persawahan, menjadi peluang pengembangan pangan pokok alternatif berbasis lokal,
7. Lumbung pangan masyarakat merupakan salah satu komponen pendukung ketersediaan dan cadangan pangan di Kabupaten Temanggung, yang dapat dikembangkan untuk mengatasi fluktuasi harga pangan khususnya gabah di saat panen raya dan saat paceklik.
8. Pemanfaatan Gudang Cadangan Pangan TUGUR yang belum optimal (volume pengisian belum sesuai kapasitas gudang).
9. Pola konsumsi masyarakat yang belum memenuhi Pola Pangan Harapan, dimana konsumsi pangan hewani masih perlu

ditingkatkan, hal ini berhubungan dengan tingkat ketersediaan pangan hewani dan tingkat ekonomi/kesejahteraan.

10. Perhatian masyarakat yang mulai meningkat akan isu kesehatan, menjadi pendorong pengembangan aspek keamanan pangan;
11. Potensi kerawanan pangan akibat bencana alam, maupun kegagalan panen yang mengancam tingkat ketersediaan pangan memerlukan langkah antisipasi
12. Belum meratanya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana distribusi pangan di wilayah Kabupaten Temanggung
13. Pembangunan ketahanan pangan merupakan hal kompleks, multi sektor, memerlukan koordinasi seluruh aspek terkait, sehingga Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung mempunyai peran dan fungsi strategis dalam hal tersebut.
14. Kelengkapan data dan informasi Ketahanan Pangan menjadi hal penting sebagai bahan analisa perencanaan dan evaluasi pembangunan Ketahanan Pangan.

## BAB III

### ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung merupakan salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan dalam lingkup urusan ketahanan pangan.

Tabel 10. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung

Aspek Kajian	Capaian/kondisi saat ini	standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi	
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (di luar kewenangan SKPD)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Gambaran pelayanan SKPD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan energi dan protein per kapita sudah berada diatas standard minimal</li> <li>2. Cadangan Pangan Kabupaten Temanggung terdiri atas cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat</li> <li>3. Tersedianya informasi harga, pasokan dan akses pangan masyarakat di Kabupaten Temanggung</li> <li>4. Stabilitas harga dan pasokan pangan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan minimal energi sebesar 2200 kkal/kap/hr dan protein minimal dan protein sebesar 57 gr/kap/hr</li> <li>2. Cadangan pangan minimal untuk Kabupaten sebesar 100 ton</li> <li>3. Target SPM Minimal 90 % di tahun 2015</li> <li>4. Target Minimal SPM 90% di tahun 2015</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melibatkan banyak stakeholder terkait dalam rangka mencapai ketersediaan pangan yang cukup</li> <li>2. Masih terbatasnya pengisian Gudang Cadangan Pangan Pemerintah</li> <li>3. Pendataan / survey harga pasokan dan akses pangan</li> <li>4. Analisa distribusi pangan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Produksi pangan, angka pertumbuhan penduduk daerah, Faktor daya dukung lingkungan dan anomali iklim (iklim ekstrem)</li> <li>2. Pemberdayaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD)</li> <li>3. Pencatatan arus keluar masuk barang di jembatan timbang</li> <li>4. Fluktuasi harga pasar, kebijakan pemerintah di bidang perdagangan</li> </ol>

	5. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 88.5 di tahun 2013	5. Target SPM 90 di tahun 2015	5. Potensi pangan lokal Kabupaten Temanggung	5. Tingkat kesadaran masyarakat, tenaga penyuluh yang menguasai masalah ketahanan pangan, khususnya konsumsi pangan dan gizi
	6. Masih beredarnya pangan yang mengandung bahan tambahan berbahaya, belum ada labelisasi/standar isai pangan segar  7. Potensi terjadinya Kerawanan pangan	6. Target SPM 80% sampel pangan aman di tahun 2015  7. Target SPM 60% penanganan kerawanan pangan di tahun 2015	6. Pengolahan pangan dengan memperhatikan standar keamanan pangan,  7. Pengisian Gudang cadangan Pangan Pemerintah, penguatan cadangan pangan masyarakat, penanganan kerawanan pangan	6. Tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pangan sehat  7. Bencana Alam, Kerawanan Pangan terstruktur/ Kronis akibat kemiskinan.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsinya, maka beberapa faktor kunci yang bisa diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Perlunya koordinasi antar stakeholder pelaksana urusan ketahanan pangan.
2. Perlunya data base ketahanan pangan sebagai acuan untuk mengembangkan program/kegiatan yang efektif dan efisien dalam mengembangkan ketahanan pangan
3. Kesesuaian target/sasaran program/kegiatan sehingga tidak terjadi salah sasaran
4. Peningkatan produksi pangan utamanya pangan hewani yang mampu meningkatkan produksi pangan hewani di tingkat lokal, sehingga bisa secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan hewani
5. Pengembangan desa-desa mandiri pangan guna mendukung kemandirian dan kedaulatan pangan daerah
6. Potensi pemanfaatan pekarangan dalam mendukung ketersediaan

pangan

7. Pemberdayaan pangan lokal Kabupaten Temanggung
8. Peningkatan teknologi dan inovasi pengembangan dan pemanfaatan pangan lokal
9. Pemberdayaan lumbung pangan masyarakat dalam rangka penguatan cadangan pangan, sekaligus sebagai sarana distribusi pangan yang membantu masyarakat dalam mengakses pangan, utamanya di masa paceklik.
10. Peningkatan fasilitas dan sarana distribusi pangan.
11. Pengembangan lembaga distribusi Pangan Masyarakat
12. Antisipasi dan Penanganan Kerawanan Pangan

### **3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati Temanggung**

Visi merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai. Visi pembangunan ketahanan pangan merupakan koridor utama upaya pembangunan ketahanan pangan yang mengawal kesinergisan dan perjalanan sektor ketahanan pangan menuju kondisi yang dicita-citakan.

Visi Kabupaten Temanggung adalah :

**“TERWUJUDNYA TEMANGGUNG SEBAGAI DAERAH AGRARIS  
BERWAWASAN LINGKUNGAN, BERMASYARAKAT AGAMIS,  
BERBUDAYA, DAN SEJAHTERA DENGAN PEMERINTAHAN YANG  
BERSIH”**

Daerah agraris berwawasan lingkungan merupakan sebuah kondisi daerah yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi daerah yang secara ekonomi bertumpu pada sektor pertanian sebagai penggerak utama perekonomian daerah dan tumpuan kehidupan masyarakat. Sebagai sektor penggerak perekonomian daerah maka pengembangan sektor pertanian tetap dengan memperhatikan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Daerah agraris, merupakan modal besar Kabupaten Temanggung dalam mencapai kondisi ketahanan pangan. Kabupaten Temanggung merupakan daerah penghasil produk pertanian dalam arti luas, dengan kondisi surplus setiap tahun. Ketersediaan pangan setara beras Kabupaten Temanggung tahun 2011 mencapai 121.361 ton, 2012 sejumlah 166.424 ton, dan tahun 2013 senilai 170.910 ton. Dengan jumlah penduduk 733.598 jiwa (2012), dan tingkat konsumsi beras 93.3 kg per kapita per th (berdasarkan survey PPH 2013), dicapai surplus 77.366,22 ton beras, 58.232,85 ton jagung, dan 41.883,64 ubi kayu. Ketersediaan Pangan daerah ini didukung pula oleh ketersediaan pangan hewani dari sektor peternakan dan sektor perikanan.

Namun demikian, penyebaran produksi tidak merata sepanjang tahun dan diseluruh wilayah kabupaten karena kondisi geografis wilayah, ancaman kelestarian produksi terkait alih fungsi lahan, daya dukung lingkungan, yang berbanding terbalik dengan situasi konsumsi berupa peningkatan kebutuhan pangan seiring peningkatan jumlah penduduk, menjadi faktor-faktor yang patut diwaspadai dan diantisipasi untuk jangka waktu kedepan guna kelestarian ketahanan pangan di Kabupaten Temanggung, diantaranya adalah melalui pembangunan urusan ketahanan pangan.

Guna mewujudkan Visi tersebut di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung menetapkan 6 (enam misi) daerah, dimana Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan dilaksanakan untuk mendukung pencapaiansalah satu misi tersebut yaitu : ***“Mewujudkan Peningkatan Pertanian Modern yang Berwawasan Lingkungan”***;

Sektor Pertanian merupakan salah satu sektor yang mendapatkan perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Temanggung karena Sektor Pertanian diharapkan dapat menjadi sektor tumpuan kehidupan masyarakat. Sektor Pertanian yang dimaksud adalah sektor pertanian dalam arti luas, sebagai pendukung tercapainya sasaran daerah yaitu meningkatkan Ketahanan Pangan di daerah Kabupaten Temanggung.

Berikut merupakan rangkuman berbagai faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi pelayanan SKPD Kantor Ketahanan Pangan terhadap Pencapaian Visi Misi dan program kepala daerah terpilih.

Tabel 11. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kantor Ketahanan Pangan terhadap Pencapaian Visi Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih

Visi : terwujudnya Temanggung sebagai daerah agraris berwawasan lingkungan, bermasyarakat agamis, berbudaya, dan sejahtera dengan pemerintahan yang bersih				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Misi: "Mewujudkan Peningkatan Pertanian Moderen yang Berwawasan Lingkungan";  Program : Peningkatan Ketahanan Pangan	ketersediaan Pangan di kabupaten Temanggung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Potensi SDA Kabupaten Temanggung</li> <li>2. Potensi di bidang peternakan dan perikanan</li> <li>3. Perkembangan IPTEK dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas pangan</li> <li>4. Telah dilaksanakannya optimalisasi pemanfaatan pekarangan dalam mendukung ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alih fungsi lahan</li> <li>2. Penurunan daya dukung lingkungan (tanah, iklim)</li> <li>3. Tingkat pertumbuhan penduduk cukup tinggi</li> <li>4. Serangan hama penyakit yang dapat menurunkan produksi</li> <li>5. Pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan perkembangan teknologi di bidang pertanian dalam arti luas perlu ditingkatkan</li> <li>6. Optimalisasi pemanfaatan pekarangan belum dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat, terutama perlunya inovasi pada lahan sempit</li> </ol>
		Kondisi cadangan pangan di kabupaten Temanggung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keberadaan gudang cadangan Pemerintah Kabupaten</li> <li>2. Keberadaan lumbung-lumbung pangan masyarakat</li> <li>3. Keberadaan Cadangan pangan pemerintah Desa (CPPD)</li> <li>4. Adanya alokasi cadangan pangan kabupaten di BULOG dan BPCP</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanfaatan gudang belum optimal</li> <li>2. Perlunya pemberdayaan lumbung pangan agar fungsinya lebih optimal</li> <li>3. Pengembangan CPPD perlu ditingkatkan</li> <li>4. Perlunya koordinasi lebih lanjut antar stakeholder terkait prosedur dan alokasi pemanfaatannya</li> </ol>
		Aspek distribusi dan akses pangan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya sarana dan prasarana distribusi pangan di seluruh wilayah Kabupaten Temanggung</li> <li>2. Terpantaunya harga</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kondisi sarana dan prasarana distribusi belum merata di seluruh kabupaten</li> <li>2. Fluktuasi harga pasar yang mengikuti permintaan dan ketersediaan pangan sulit</li> </ol>

			<p>pangan</p> <p>3. Kelancaran arus distribusi pangan untuk menjamin pasokan pangan</p> <p>4. Kemudahan masyarakat dalam mengakses pangan, terkait dengan ketersediaan pangan</p>	<p>dikendalikan</p> <p>3. Ketersediaan data pasokan untuk setiap komoditas pangan belum ada</p> <p>4. Pengaruh tingkat kesejahteraan masyarakat dalam mengakses pangan,</p>
		Konsumsi dan keamanan pangan	<p>1. Potensi pangan lokal kabupaten temanggung</p> <p>2. Kearifan lokal dalam bidang konsumsi (nasi jagung sebagai makanan pokok bagi sebagian penduduk)</p> <p>3. Skor PPH cukup baik (skor 88,5 di tahun 2013 dari skala 0-100)</p> <p>4. Perhatian masyarakat terhadap isu kesehatan meningkat</p> <p>5. Perkembangan IPTEK dalam bidang pengolahan pangan</p>	<p>1. Pangan lokal belum optimal dikembangkan dan dimanfaatkan</p> <p>2. Kebijakan RASKIN, stigma terhadap konsumsi nasi jagung,</p> <p>3. Sulitnya meningkatkan skor PPH di kelompok pangan hewani, karena terkait dengan harga yang relatif mahal</p> <p>4. Masyarakat belum sepenuhnya memahami, sehingga masih beredar pangan yang mengandung bahan tambahan berbahaya</p> <p>5. Teknologi dan inovasi pengolahan pangan belum sepenuhnya berkembang sampai ke pelosok kabupaten</p>
		Penanganan Kerawanan pangan	Secara ketersediaan pangan, Kabupaten Temanggung bukan daerah rawan pangan	Adanya potensi kerawanan pangan transien akibat bencana alam
		Kelembagaan dan sumber daya aparatur	<p>1. Keberadaan Dewan Ketahanan pangan kabupaten Temanggung</p> <p>2. MoU antara KKP dengan TP-PKK di bidang percepatan penganekaragaman konsumsi pangan</p> <p>3. Peraturan Bupati Temanggung nomor 9 tahun 2010 tentang percepatan</p>	<p>1. Peran dan fungsi DKP belum optimal dalam merumuskan kebijakan dan mengatasi permasalahan di bidang ketahanan pangan</p> <p>2. Ketersediaan dana pelaksanaan belum sebanding dengan fungsi yang harus dijalankan</p> <p>3. Keterbatasan KKP secara kelembagaan sebagai SKPD eselon III untuk mengkoordinasikan urusan</p>

			<p>penganeekaragaman konsumsi pangan Kabupaten Temanggung</p> <p>4. Keberadaan KKP sebagai SKPD pelaksana urusan ketahanan pangan</p>	<p>ketahanan pangan yang sebagian besar dilaksanakan SKPD teknis eselon II</p> <p>4. Peran penyuluh dalam rangka meningkatkan pemahaman akan ketahanan pangan terhadap masyarakat sangat penting, tetapi belum sepenuhnya penyuluh memahami konsep ketahanan pangan</p> <p>5. Keterbatasan SDM di Kantor Ketahanan Pangan.</p>
--	--	--	---	--

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

#### 3.3.1. *Visi Kementrian Pertanian Badan Ketahanan Pangan*

Perencanaan pembangunan ketahanan pangan tidak hanya pada peningkatan produktifitas yang tinggi, tetapi juga apakah peningkatan produksi pangan tersebut sudah dapat memperbaiki gizi masyarakatnya. Oleh karena itu perencanaan ketahanan pangan harus bersifat holistik, realistik, kontinyu dan aktual. Konsekuensinya dalam pembuatan perencanaan pangan bukan hanya hasil saja yang harus diperlihatkan, tetapi juga mengenai bagaimana caranya merumuskan pilar ketersediaan dan kerentanan pangan, pilar distribusi pangan dan pilar pola konsumsi dan keamanan pangan dapat berproses dan berjalan secara sinergis.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian Republik Indonesia mempunyai visi 2010 – 2014, yaitu:

*“Menjadi institusi yang handal, aspiratif, dan inovatif dalam pemantapan ketahanan pangan”.*

#### 3.1.2. *Misi Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian*

Untuk mencapai visi di atas, Badan Ketahanan Pangan mengemban misi dalam tahun 2010 – 2014, yaitu :

- a. Peningkatan kualitas pengkajian dan perumusan kebijakan pembangunan ketahanan pangan.

- b. Pengembangan dan pemantapan ketahanan pangan masyarakat, daerah, dan nasional
- c. Pengembangan kemampuan kelembagaan ketahanan pangan daerah;
- d. Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan, dan pengembangan ketahanan pangan, serta pemantaauan dan evaluasi pelaksanaannya.

Kebijakan pembangunan ketahanan pangan di tingkat nasional mengikuti Renstra Kementrian periode 2010-2014 lingkup Badan Ketahanan Pangan, sesuai tugas pokok dan fungsinya memiliki 1 (satu) program, yaitu **Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**, yang mencakup empat kegiatan utama yaitu:

1. Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan;
2. Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan;
3. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar;
4. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Badan Ketahanan Pangan.

Keempat kegiatan utama tersebut pada dasarnya untuk melanjutkan kegiatan sebelumnya, dengan penyempurnaan dan pemantapan secara terpadu dan terkoordinasi, yaitu:

1. Pengembangan desa mandiri pangan di daerah miskin dan rawan pangan;
2. Penanganan kerawanan pangan transien dan kronis;
3. Penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat di daerah sentra produksi pangan;
4. Pemberdayaan cadangan pangan masyarakat dan cadangan pangan pemerintah;
5. Diversifikasi Pangan.

### **3.1.3. Misi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah**

Visi : Menjadi Lembaga yang Handal dan Profesional dalam Memantapkan Ketahanan Pangan Masyarakat yang Berbasis Sumber Daya Lokal Menuju Kemandirian Jawa Tengah

Misi :

- Mewujudkan tata kelola lembaga yang baik berbasis teknologi informasi didukung oleh sumberdaya aparatur yang kompeten dan berintegritas tinggi. Misi ini diarahkan untuk mewujudkan peningkatan tata kelola lembaga melalui penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, dengan didukung sumber daya aparatur yang professional dan memiliki integritas tinggi serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mencapai pelayanan prima.
- Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan akses pangan serta penanganan kerawanan pangan. Misi ini diarahkan untuk memantapkan ketahanan pangan di Jawa Tengah melalui peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan akses pangan serta penanganan kerawanan pangan.
- Meningkatkan penganeekaragaman dan mutu pangan. Misi ini diarahkan untuk memantapkan ketahanan pangan melalui peningkatan penganeekaragaman dan mutu pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal.

Permasalahan Pelayanan kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung berdasarkan sasaran Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, beserta faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel.12 Permasalahan Pelayanan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung Berdasarkan Sasaran Renstra Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tercapainya kapasitas sumberdaya aparatur dan kualitas sarana prasarana perkantoran.</li> <li>2. Tercapainya efektifitas koordinasi perumusan kebijakan ketahanan pangan.</li> <li>3. Tercapainya ketersediaan pangan utama.</li> <li>4. Tercapainya penguatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat.</li> <li>5. Tercapainya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan strategis di daerah.</li> <li>6. Tercapainya penanganan daerah rawan pangan.</li> <li>7. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan.</li> <li>8. Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat.</li> <li>9. Tercapainya pembinaan dan pengawasan pangan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan sumber daya aparatur dan kualitas sarana dan prasarana perkantoran</li> <li>2. Belum optimalnya peran DKP dalam koordinasi perumusan kebijakan ketahanan pangan</li> <li>3. Sebagian ketersediaan pangan utama berasal dari pasokan luar daerah</li> <li>4. Perlunya pemberdayaan CPPD dan lumbung pangan masyarakat</li> <li>5. Perlunya peningkatan analisa distribusi pangan</li> <li>6. Belum optimalnya peran dan fungsi gudang cadangan pangan daerah dalam antisipasi kerawanan pangan</li> <li>7. Kapasitas SDM pendukung pembangunan ketahanan pangan masih terbatas</li> <li>8. Skor PPH belum memenuhi target SPM</li> <li>9. Masih beredarnya pangan dengan tambahan bahan berbahaya bagi kesehatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beberapa SDM sudah kompeten di bidangnya</li> <li>2. Pelaksanaan Rakor DKP mendapatkan alokasi anggaran secara rutin</li> <li>3. Potensi agraris Temanggung sebagai produsen pangan dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan</li> <li>4. Pelaksanaan kegiatan untuk pemberdayaan lumbung pangan masyarakat</li> <li>5. Pelaporan rutin dari petugas enumerator sebagai bahan analisa distribusi</li> <li>6. Adanya alokasi anggaran untuk penanganan kerawanan pangan, adanya gudang cadangan pangan pemerintah, alokasi cadangan pangan di BULOG dan CPPD yang tersedia untuk kabupaten</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rasio jumlah dan kompetensi pegawai tidak sesuai dengan fungsi dan beban kerja</li> <li>2. Kantor ketahanan pangan sebagai SKPD eselon III harus mengkoordinasikan SKPD dengan tingkat eselon di atasnya</li> <li>3. Pertumbuhan penduduk dibandingkan laju pertumbuhan produksi pangan tidak seimbang</li> <li>4. Pengembangan CPPD perlu ditingkatkan</li> <li>5. Belum lengkapnya ketersediaan data distribusi pangan untuk seluruh komoditas</li> <li>6. Pengisian gudang cadangan pangan belum optimal, koordinasi lebih lanjut dengan SKPD lain seperti BPBD untuk mekanisme penyaluran bantuan dari BULOG</li> <li>7. Pemahaman aparatur sipil negara dalam pemahaman tentang ketahanan pangan perlu ditingkatkan</li> </ol>

### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Temanggung merupakan

dokumen perencanaan wilayah yang memadukan keunggulan komoditas dan wilayah. Dalam Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah, dapat diidentifikasi indikasi program pemanfaatan Ruang serta pengaruh Rencana struktur pengembangan wilayah di Kabupaten Temanggung, dalam hubungannya dengan peningkatan ketahanan pangan.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2025 dapat diketahui rencana penataan kawasan dalam kaitannya terhadap ketersediaan pangan daerah, melalui penetapan kawasan sebagai daerah pengembangan komoditas-komoditas pangan strategis baik dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, serta perikanan. Rencana tata Ruang tata Wilayah kabupaten Temanggung juga mengawal keestarian lahan produksi pangan melalui penetapan lahan Pertanian Pangan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, serta lahan cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dari penelaahan terhadap dokumen RTRW dapat pula dianalisa alur distribusi pangan, serta indikasi potensi kerawanan pangan akibat bencana alam, dengan memperhatikan tipologi dan struktur kawasan antara lain dalam kawasan Rawan gerakan tanah, rawan banjir, rawan bencana gunung berapi dan gempa bumi.

*Tabel.13 Permasalahan Pelayanan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah, beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya*

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Ditetapkannya kawasan – kawasan agropolitan, Minapolitan, Kawasan Perikanan, Penetapan lahan Pertanian Pangan, lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Produksi pangan harus terus ditingkatkan untuk mendukung kebutuhan akan ketersediaan dan cadangan pangan di Kabupaten Temanggung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat diketahui sentra-sentra produksi pangan</li> <li>2. Adanya perlindungan terhadap kelestarian lahan produksi pangan</li> <li>3. Peta kawasan rawan bencana menjadi bahan referensi untuk antisipasi kerawanan pangan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak semua daerah berpotensi menjadi kawasan produksi</li> <li>2. Penurunan daya dukung lingkungan akibat aktivitas di kawasan industri</li> <li>3. Terjadinya bencana bersifat insidental, sewaktu-waktu, tidak dapat diprediksi</li> </ol>
2	Penetapan kawasan Rawan Gerakan tanah, Rawan banjir, rawan bencana gempa bumi, rawan bencana gunung berapi	Adanya potensi kerawanan pangan akibat bencana alam		

Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) adalah telaahan lingkungan hidup yang bersifat strategis terutama terkait dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan (*Sustainable Development*). Lingkungan hidup menjadi isu penting yang menyangkut ketahanan pangan. Pembangunan ketahanan pangan mengupayakan Kabupaten Temanggung sebagai kawasan pangan lestari, dimana ketersediaan pangan terjamin bagi setiap penduduk Kabupaten Temanggung, melalui program peningkatan ketahanan pangan, baik dari aspek produksi, pengembangan distribusi, maupun pemanfaatan dan konsumsi pangan yang memperhatikan aspek-aspek lingkungan.

Dalam kajian lingkungan hidup strategis disebutkan bahwa aktivitas –aktivitas pembangunan menimbulkan dampak yang kurang baik bagi lingkungan. Disebutkan bahwa pembangunan bidang pangan seperti aktivitas pertanian, perkebunan peternakan dan perikanan menimbulkan dampak berupa perubahan keseimbangan ekosistem akibat alih fungsi lahan ke fungsi pertanian dalam arti luas, dampak limbah kotoran, obat-obatan dan pakan ternak, dampak berupa perubahan pola drainase dan polusi udara sebagai akibat aktivitas distribusi dan pembangunan infrastrukturnya seperti pembangunan jalan, jembatan, dan aktivitas transportasi/angkutan komoditas pangan.

Permasalahan pelayanan yang dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung dalam kaitannya dengan analisa serta kajian lingkungan hidup strategis adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

*Tabel.14 Permasalahan Pelayanan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung berdasarkan Analisis KLHS, beserta faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya*

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Adanya dampak atas aktivitas program-program pendukung ketahanan pangan seperti peningkatan produksi pangan (Pertanian,	1. Produksi pangan harus terus ditingkatkan, seiring penambahan kebutuhan akibat	1. Sumber daya alam Temanggung mendukung aktivitas agraris pengembangan budidaya pangan	1. Proses budidaya yang mengeksploitasi lahan berlebihan, dapat mengancam kelestarian produksi pangan 2. Limbah proses

perkebunan, peternakan dan perikanan), aktivitas pengolahan dan konsumsi pangan, serta distribusi dan peningkatan akses pangan masyarakat, terhadap kondisi lingkungan	<p>pertumbuhan penduduk</p> <p>2. Peningkatan sarana dan aktivitas distribusi masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan</p>	2. Kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan pengembangan infrastruktur distribusi pangan	<p>pemanfaatan/pengoahan pangan berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup</p> <p>3. Pembangunan infrastruktur distribusi pangan berpotensi menimbulkan masalah lingkungan dan kesehatan</p>

### 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pembangunan Ketahanan Pangan di Kabupaten Temanggung dalam periode pembangunan jangka menengah 2013-2018 tentunya sangat dipengaruhi oleh dinamika seluruh aspek ketahanan pangan, baik di tingkat lokal kabupaten, regional, nasional, maupun global. Dinamika tersebut akan sangat mewarnai pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Temanggung dan dapat menjadi faktor penghambat atau sebaliknya, menjadi faktor pendorong terlaksananya peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Temanggung.

Beberapa isu strategis yang dapat dihimpun dalam kerangka pembangunan Ketahanan Pangan di Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Undang Undang tentang Pangan dari UU nomor 7 tahun 1996 menjadi UU nomor 18 tahun 2012;
2. Permentan Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan kabupaten/kota dengan target pencapaian di tahun 2015;
3. Pergantian kepemimpinan di tingkat Provinsi yang berkorelasi dengan visi dan misi baru pembangunan ketahanan pangan di Provinsi Jawa Tengah.
4. Target pembangunan millenium/global (MDGs), dimana salah satu tujuannya adalah memberantas kemiskinan dan kelaparan;
5. Rencana Aksi Daerah di bidang Pangan dan Gizi (RAD PG);
6. Kearifan lokal penduduk Kabupaten Temanggung dalam mengkonsumsi pangan lokal (Nasi Jagung);

7. Masuknya Indonesia dalam AEC yang memerlukan kesiapan, utamanya daya saing produk pangan/pertanian dalam arti luas;
8. Makin berkurangnya lahan produktif bagi produksi pangan;
9. Tingginya angka pertumbuhan penduduk;
10. Perubahan cuaca/iklim global yang turut membawa anomali iklim di Indonesia yang menyebabkan cuaca/iklim ekstrem,
11. Perkembangan IPTEK, termasuk teknologi &Inovasi bidang pemanfaatan/pengolahan pangan;
12. Belum meratanya infrastruktur, sarana dan prasarana distribusi pangan
13. Tingkat pendidikan rata-rata masyarakat Kabupaten Temanggung, yang mempengaruhi tingkat pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya pola pangan ideal beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA);
14. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang sangat mempengaruhi akses terhadap pangan;
15. Kondisi alam Kabupaten Temanggung, yang mempengaruhi sebaran komoditas dan alur distribusi pangan;

## BAB IV.

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pembangunan Ketahanan Pangan pada periode 2013-2018 dilaksanakan untuk mendukung visi, misi, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung sebagaimana dalam Peraturan Bupati No 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018.

Pembangunan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung diarahkan bertumpu pada pengembangan potensi lokal yang memiliki keunggulan komparatif agar dapat dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal dan lestari, guna mendukung peningkatan ketahanan pangan. Diharapkan, pangan berbasis lokal tersebut mampu bersaing secara kompetitif, dan memiliki *multiplier effect* yang cukup tinggi terhadap sektor yang lain.

#### 4.1. Visi dan Misi SKPD

Visi Kepala Daerah Kabupaten Temanggung yang terpilih untuk menjabat dalam periode 2013-2018 adalah: ***“Terwujudnya Temanggung sebagai Daerah Agraris Berwawasan Lingkungan, Bermasyarakat Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera dengan Pemerintahan yang Bersih”***

Sejalan dengan visi tersebut, Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung menetapkan visi SKPD berupa :

***Terwujudnya Peningkatan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung Berbasis Lokal, melalui Pertanian Modern yang Berwawasan Lingkungan”***

Sejalan dengan Misi pertama Pemerintah Kabupaten Temanggung yaitu *“Mewujudkan Peningkatan Pertanian Modern yang Berwawasan Lingkungan”*; Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung menetapkan Misi SKPD yaitu : ***Mewujudkan Peningkatan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung Berbasis Lokal, melalui Pertanian Modern yang Berwawasan Lingkungan*** melalui upaya sebagai berikut :

#### **4.1.1. Mewujudkan Peningkatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan Kabupaten Temanggung**

Peningkatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan Kabupaten Temanggung dilaksanakan dengan mendorong peningkatan produksi pangan baik nabati maupun hewani berbasis lokal, pengembangan pemanfaatan pekarangan untuk mendukung ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga, serta penguatan cadangan pangan melalui optimalisasi pengisian gudang cadangan pangan pemerintah dan pemberdayaan / pengembangan lumbung pangan masyarakat.

#### **4.1.2. Mewujudkan Peningkatan Distribusi dan Akses Pangan di wilayah Kabupaten Temanggung**

Sarana dan Prasarana Distribusi pangan di Wilayah Kabupaten Temanggung yang terdiri atas 20 kecamatan, 289 desa/kelurahan, belum sepenuhnya merata. Melalui upaya pemantauan harga, pasokan, dan akses pangan masyarakat, diharapkan dapat terlaksana analisa distribusi pangan, sebagai dasar penentuan kebijakan pembangunan dalam rangka peningkatan distribusi dan akses pangan masyarakat. Pengembangan dan pembinaan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), pemberdayaan lumbung pangan sebagai sarana distribusi pangan, serta fasilitasi dalam peningkatan akses pangan masyarakat menjadi upaya konkrit dalam pencapaiannya.

#### **4.1.3. Mewujudkan Peningkatan Penganekaragaman dan Keamanan Pangan di Kabupaten Temanggung**

Konsumsi pangan ideal adalah konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman, dengan indikasi tingginya capaian skor PPH. Konsumsi pangan dengan keseimbangan komposisi tiap-tiap kelompok pangan, dengan memperhatikan aspek keamanan pangan adalah hal yang diharapkan dapat terwujud.

Optimalisasi pemanfaatan pangan lokal diharapkan dapat menekan tingkat kebutuhan bahan pangan impor, sebagai langkah pendukung menuju kemandirian dan kedaulatan pangan Kabupaten Temanggung.

#### **4.1.4. Mewujudkan Peningkatan Antisipasi dan Penanganan Kerawanan Pangan**

Kabupaten Temanggung dari kacamata produksi dan ketersediaan pangan, bukan merupakan daerah rawan pangan. Namun demikian potensi kerawanan pangan masih ada, dalam keterkaitannya dengan potensi bencana alam seperti tanah longsor, banjir, bencana kekeringan, maupun kegagalan panen akibat serangan hama penyakit. Hal ini memerlukan kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan tersebut.

Gudang cadangan pangan pemerintah "TUGUR" yang terletak di Kelurahan Kertosari-Temanggung merupakan salah satu aset yang dapat dioptimalkan pemanfaatannya untuk mengantisipasi kerawanan pangan yang terjadi, selain adanya alokasi cadangan pangan tingkat Kabupaten yang ada di BULOG sebesar 100 ton setiap tahunnya, yang siap disalurkan saat terjadi bencana.

#### **4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD**

Misi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 dijabarkan lebih lanjut dalam Tujuan yaitu meningkatkan ketahanan pangan daerah, dengan sasaran Pembangunan Ketahanan pangan berupa meningkatnya ketahanan pangan daerah, dengan indikator-indikator pencapaian sebagai berikut :

- Cakupan Ketersediaan Energi per Kapita
- Cakupan ketersediaan Protein per Kapita
- Peningkatan cadangan Pangan Masyarakat
- Prosentase penguatan cadangan pangan pemerintah
- Cakupan penanganan kerawanan pangan
- Persentase meningkatnya skor pola pangan harapan
- Cakupan pengawasan dan pembinaan kerawanan pangan
- Besaran Desa Mandiri Pangan
- Besaran Percepatan Penganekaragaman konsumsi pangan
- Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan

Tabel 15. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatkan ketahanan pangan daerah	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Cakupan Ketersediaan Energi per Kapita	2800	2850	2900	2940	2980
			Cakupan Ketersediaan protein per Kapita	73.54	74	74.75	75.5	75,99
			Peningkatan cadangan pangan masyarakat	43	51	59	67	75
			Persentase penguatan cadangan pangan pemerintah	10	10	10	10	10
			Cakupan Penanganan Kerawanan Pangan	60	60	75	75	85
			Persentase Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan	89	90	90.45	90.85	91
			Cakupan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	60	80	80	85	90
			Besaran Desa Mandiri Pangan	8	9	9	10	10
			Besaran percepatan penganekaragaman konsumsi pangan	3	4	4	5	5
			Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga, dan Akses Pangan	70	90	95	100	100

#### 4.3. Strategi dan Kebijakan Kantor Ketahanan Pangan

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, maka strategi yang ditetapkan oleh Kantor Ketahanan Pangan dalam mencapai misi yang telah ditetapkan adalah :“*Peningkatan ketahanan pangan dari aspek ketersediaan,distribusi dan konsumsi pangan*”, dengan arah kebijakan

meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan akses pangan, diversifikasi konsumsi dan keamanan pangan, serta penanganan kerawanan pangan.

Tabel 16. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Peningkatan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung Berbasis Lokal, melalui Pertanian Modern yang Berwawasan Lingkungan”			
Misi : Mewujudkan Peningkatan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung Berbasis Lokal, melalui Pertanian Modern yang Berwawasan Lingkungan			
Tujuan 91)	Sasaran (2)	Strategi (3)	Kebijakan (4)
Meningkatkan ketahanan pangan daerah	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Peningkatan ketahanan pangan dari aspek ketersediaan,distribusi dan konsumsi pangan	Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan akses pangan, diversifikasi konsumsi dan keamanan pangan, serta penanganan kerawanan pangan

**BAB V.**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,**  
**KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**5.1 Rencana Program Dan Kegiatan**

Sesuai dengan tupoksi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung, dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung periode 2013-2015, terdapat beberapa program dan kegiatan dalam rencana strategis Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana berikut :

- a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
  - Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan
  - Pendampingan dan pembinaan Desa Mandiri Pangan
  - Model Pengembangan Kemandirian Pangan Desa
  - Fasilitasi Kredit Ketahanan Pangan dan Energi
  - Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan Pekarangan
  - Pengisian Gudang Cadangan Pangan dan Kerawanan Pangan
  - Pemberdayaan lumbung pangan Masyarakat/Desa
  - Pendampingan dan pembinaan LDPM
  - Fasilitasi Distribusi dan Akses Pangan
  - Pendampingan Pengembangan Konsumsi Pangan B2SA
  - Pendampingan P2KP
  - Pengembangan Pengolahan Pangan Lokal
  - Peningkatan dan Pengembangan Keamanan Pangan'
  - Penyusunan Data Base Ketahanan Pangan
- b. Program Perencanaan Pembangunan daerah
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD
- c. Program pelayanan administrasi perkantoran
  - Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
  - Penyediaan jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
  - Penyediaan jasa kebersihan kantor
  - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
  - Penyediaan Alat Tulis Kantor

- Penyediaan barang cetak dan penggandaan
  - Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
  - Pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundangan
  - Penyediaan makan dan minuman
  - Rapat – rapat koordinasidan konsultasi keluar daerah
  - Rapat – rapat koordinasidan konsultasi dalam daerah
  - Jasa pelayanan perkantoran
- d. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor
  - Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
  - Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
- e. Program peningkatan disiplin aparatur
- Pengadaan pakaian dinas / hari – hari tertentu

## 5.2. Indikator Kinerja

Indikator kinerja, yang menjadi tolok ukur pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 2013 – 2015 menggambarkan capaian pelayanan dasar bidang ketahanan pangan yang meliputi bidang ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan akses pangan, penganekaragaman dan keamanan pangan,serta pelayanan dasarbidang penanganan rawan pangan sebagaimana tertuang dalam SPM Bidang Ketahanan Pangan. Indikator-indikator tersebut adalah :

- a. Cakupan Ketersediaan Energi per Kapita
- b. Cakupan Ketersediaan protein per Kapita
- c. Peningkatan cadangan pangan masyarakat
- d. Persentase penguatan cadangan pangan pemerintah
- e. Cakupan Penanganan Kerawanan Pangan
- f. Persentase Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan
- g. Cakupan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan
- h. Besaran Desa Mandiri Pangan
- i. Besaran percepatan penganekaragaman konsumsi pangan
- j. Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga, dan Akses Pangan

### 5.3. Kelompok Sasaran

Sasaran pembangunan ketahanan pangan adalah meningkatnya ketahanan pangan melalui pemberdayaan kelompok tani/gapoktan, kelompok lumbung pangan masyarakat, kelompok wanita tani, anggota Tim Penggerak PKK, Kelompok masyarakat yang bergerak dalam pengolahan pangan lokal, masyarakat rawan pangan, serta stakeholder terkait pembangunan ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Temanggung.

Rangkuman kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pembangunan yang dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan selama periode 2014-2018 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 17. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif  
Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Daerah (Indikator Program) dan Indikator Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2012	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												
					2013 (Sesuai APBD 2013)			2014 (sesuai DPA 2014)		2015		2016		2017		2018	
					target	prediksi capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	Meningkatnya Ketahanan Pangan	A. Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1, Cakupan Ketersediaan Energi per Kapita	2.846,55	2.794,62	2.794,62		2.800,00		2.850,00		2.900,00		2.940,00		2.980,00	
			2, Cakupan Ketersediaan protein per Kapita	74,99	70,88	70,88		73,54		74,04		74,54		74,99		75,44	
			3, Peningkatan Cadangan Pangan Masyarakat	29 unit	21%	21%		23%		23%		23%		23%		23%	
			4, Persentase penguatan cadangan pangan Pemerintah	2,60%	8,80%	10,00%		10,00%		10,00%		10,00%		10,00%		10,00%	
			5, Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	100%	0,00%	0,00%		60,00%		60,00%		75,00%		75,00%		85,00%	
			6, Meningkatnya Persentase Skor Pola Pangan Harapan	88,00%	88,50%	88,50%		89,00%		89,50%		90,00%		90,45%		90,85%	
			7, Cakupan Pengawasan dan Pembinaan	-	-	-		80,00%		80,00%		85,00%		85,00%		90,00%	

			Keamanan Pangan														
			8. Besar Desa Mandiri Pangan	8	8			8		9		9		10		10	
			9. besaran percepatan pengane karagaman konsusmsi pangan	0	2	2		3		4		4		5		5	
			10, Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga, dan Akses Pangan	66,67%	66,67%	66,67%		70,00 %		90,00%		65,00 %		100,00%		100,00%	
		A. Program perencanaan pembangunan daerah								1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000	
		Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kab.Temanggung	1 kali rakor	1 kali rakor	100%	12.377.300	1 kali rakor	14.398.500	1 kali rakor	15.000.000	1 kali rakor	15.000.000	1 kali rakor	20.000.000	1 kali rakor	20.000.000
		Pendampingan Desa Mandiri Pangan	Terfasilitasinya kegiatan APBN-Desa Mandiri pangan	8 desa	8 desa	100%	16.992.000	8 desa	13.500.000	9	30.000.000	9	30.000.000	10	30.000.000	10	30.000.000
		Model Pengembangan Kemandirian Pangan Desa	meningkatnya ketersediaan, distribusi dan akses pangan, serta kualitas konsumsi masyarakat desa	0	0	0	0	0	0	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000
		Fasilitasi Kredit Ketahanan Pangan dan Energi	Terfasilitasinya Pengajuan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi dari perbankan bagi kelompok Tani/Gapoktan	12 bulan	12 bulan	100%	4.413.750	100%	4.996.000	12 bulan	5.000.000	12 bulan	5.000.000	12 bulan	7.500.000	12 bulan	7.500.000

		Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan Pekarangan	Tersalurnya bantuan ternak pekarangan bagi masyarakat					5 lokasi	49.946.000	5 lokasi	50.000.000	5 lokasi	50.000.000	5 lokasi	60.000.000	5 lokasi	60.000.000
		Pemberdayaan lumbung pangan Masyarakat/Desa	Terlaksananya sosialisasi kegiatan	14 klpk	12 klpk	100%	18.429.400	8 klpk	20.000.000	8 klpk	24.000.000	8 klpk	24.000.000	8 klpk	25.000.000	8 klpk	25.000.000
			Terlaksananya monitoring pelaksanaan kegiatan	14 klpk	12 klpk	100%		8 klpk									
			Tersalurnya bantuan hibah bagi kelompok lumbung :					8 klpk									
		Pengisian Gudang Cadangan Pangan dan Kerawanan Pangan	Pengadaan beras cadangan pemerintah untuk mengisi gudang cadangan pangan pemerintah Kabupaten	2,6 ton	8.8 ton	0	44.996.000	1 paket	49.946.000	1 paket	80.000.000	1 paket	94.000.000	1 paket	95.000.000	1 paket	95.000.000
		Pendampingan LDPM	Terfasilitasinya kegiatan LDPM-APBN	5 lokasi	5 lokasi	100%	19.589.300	5 lokasi	20.000.000	5 lokasi	30.000.000						
		Fasilitasi Distribusi dan Akses Pangan	Terlaksananya sosialisasi kegiatan	1 lokasi	3 lokasi	100%	24.527.700	3 lokasi	34.062.000	5 lokasi	75.000.000	5 lokasi	89.500.000	5 lokasi	90.000.000	5 lokasi	95.000.000
			terlaksananya monev														
			Tersalurnya bantuan pengembangan distribusi / pemasaran dan fasilitasi akses														

			pangan masyarakat														
		Pengembangan Pengolahan Pangan Lokal	Tersalurinya peralatan pengolahan pangan lokal,	10 klpk	10 klpk	100%	73.029.450	7 klpk	74.241.500	7 klpk	85.000.000	7 klpk	94.000.000	7 klpk	100.000.000	7 klpk	115.000.000
			Terlaksananya sosialisasi dan pelatihan pengolahan pangan lokal	2 keg	2 keg	100%		2 keg		2 keg		2 keg		2 keg		2 keg	
			Terlaksananya pasar murah, expo dan pameran pangan lokal	4 keg	4 keg	100%		4 keg		4 keg		5 keg		5 keg		5 keg	
			Terlaksananya kampanye/gerakan minum susu	1750 org	1750 org	100%		2000 org		2250 org		2250 org		2250 org		3000 org	
			Terlaksananya gerakan / kampanye pangan lokal	1 keg	1 keg			1 keg		1 keg		1 keg		1 keg		1 keg	
			Terlaksananya lomba cipta menu B2SA di tingkat provinsi	1 keg	1 keg	100%		1 keg		1 keg		1 keg		1 keg		1 keg	
			terfasilitasinya penghitungan skor PPH	1 keg	1 keg	100%		1 keg		1 keg		1 keg		1 keg		1 keg	
		Peningkatan dan Pengembangan Keamanan Pangan'	Terlaksananya sosialisasi tentang keamanan pangan	0	0	0	0	0	0	10 klpk	50.000.000	10 klpk	50.000.000	10 klpk	55.000.000	10 klpk	56.000.000
			terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi														
			tersedianya data hasil pantauan dan														

			testkit untuk analisa keamanan pangan														
			tersalurinya bantuan peralatan keamanan pangan (showcase)														
		Pendampingan P2KP	Terfasilitasinya kegiatan P2KP-APBN	10 klpk	14 klpk	100%	25.083.000	14 klpk	19.344.000	20 klpk	25.000.000	20 klpk	25.000.000	20 klpk	30.000.000	20 klpk	30.000.000
		Pendampingan Pengembangan Konsumsi Pangan B2SA	Terlaksananya sosialisasi kegiatan	0	0	0	0	3 klpk	8.509.000	3 klpk	10.000.000	3 klpk	10.000.000	4 klpk	20.000.000	5 klpk	25.000.000
			Terlaksananya pendampingan kegiatan oleh PPL														
			Terlaksananya monitoring dan pemantauan														
			Tersalurinya bantuan hibah pengembangan konsumsi pangan B2SA														
		Penyusunan Data Base Ketahanan Pangan	Tersusunnya data base ketahanan pangan	0	0	0	0	0	0	1 keg	45.000.000	1 keg	50.000.000	1 keg	50.000.000	1 keg	52.000.000
		<b>B. Program perencanaan pembangunan</b>	tersusunnya dokumen perencanaan SKPD	0	0	0	0	0	0	1 keg	750.000	1 keg	10.000.000	1 keg	11.000.000	1 keg	12.000.000
		1. Penyusunan Dokumen perencanaan	tersusunnya LAKIP, dokumen RENJA, laporan LPPD, LKPJ, dokumen PK	0%	0	0%	0	0	0	12 bulan	750.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	11.000.000	12 bulan	12.000.000

		<b>C. Program pelayanan administrasi perkantoran</b>	Terlaksananya pelayanan Administrasi perkantoran				89.446.500		61.030.000		73.967.600		81.826.600		91.087.392		98.118.279
		1. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR dan LISTRIK	Terbayarnya rekening air, listrik, telpon/fax, dan layanan internet KKP	100%	12 bulan	100%	10.440.000	12 bulan	7.980.000	12 bulan	8.937.600	12 bulan	10.000.000	12 bulan	11.000.000	12 bulan	12.000.000
		2. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN&PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor KKP	100%	12 bulan	100%	18.445.000	12 bulan	9.000.000	12 bulan	15.000.000	12 bulan	17.000.000	12 bulan	19.000.000	12 bulan	21.000.000
		3. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	Tersedianya peralatan dan bahan untuk kebersihan kantor	100%	12 bulan	100%	1.480.000	12 bulan	1.200.000	12 bulan	1.500.000	12 bulan	1.750.000	12 bulan	2.000.000	12 bulan	2.000.000
		4. PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	Terbayarnya jasa perbaikan peralatan kerja KKP	100%	12 bulan	100%	1.500.000	12 bulan	1.500.000	12 bulan	1.500.000	12 bulan	1.750.000	12 bulan	1.750.000	12 bulan	2.000.000
		5. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	Tersedianya alat tulis untuk keperluan KKP	100%	12 bulan	100%	2.900.500	12 bulan	3.000.000	12 bulan	3.000.000	12 bulan	3.300.000	12 bulan	3.700.000	12 bulan	4.000.000
		6. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDA	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%	12 bulan	100%	2.256.000	12 bulan	1.350.000	12 bulan	1.750.000	12 bulan	2.225.000	12 bulan	2.500.000	12 bulan	2.800.000

		AN															
		7. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	12 bulan	100%	500.000	12 bulan	600.000	12 bulan	600.000						
		8. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	tersedianya bahan bacaan	100%	12 bulan	100%	900.000	12 bulan	900.000	12 bulan	1.000.000	12 bulan	1.120.000	12 bulan	1.250.000	12 bulan	1.400.000
		9. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	tersedianya minuman harian pegawai KKP dan jamuan rapat/tamu	100%	12 bulan	100%	5.400.000	12 bulan	1.500.000	12 bulan	1.680.000	12 bulan	1.881.600	12 bulan	2.107.392	12 bulan	2.360.279
		10. RAPAT-RAPAT KOODINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	12 bulan	100%	23.080.000	12 bulan	15.000.000	12 bulan	18.000.000	12 bulan	19.800.000	12 bulan	21.780.000	12 bulan	23.958.000
		11. RAPAT-RAPAT KOODINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	100%	12 bulan	100%	2.100.000	12 bulan	2.100.000	12 bulan	2.500.000	12 bulan	2.500.000	12 bulan	3.000.000	12 bulan	3.000.000
		12. JASA PELAYANAN PERKANTORAN	terbayarnya honor tenaga kebersihan/penjaga malam dan penjaga gudang cadangan	100%	12 bulan	100%	20.445.000	12 bulan	17.000.000	12 bulan	18.600.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	22.400.000	12 bulan	23.000.000

			pangan														
		<b>D. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai				19.700.000	13.000.000		13.800.000		14.000.000		16.500.000		17.000.000	
		1. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	tersedianya peralatan gedung kantor sebagai sarana/prasarana kerja KKP	100%	12 bulan	100%	15.900.000	12 bulan 10.000.000		12 bulan 10.000.000		12 bulan 10.000.000	12 bulan	12.000.000	12 bulan	12.000.000	
		2. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	terpeliharanya bangunan gedung kantor	100%	12 bulan	100%	2.800.000	12 bulan 2.500.000		12 bulan 2.800.000		12 bulan 3.000.000	12 bulan	3.000.000	12 bulan	3.500.000	
		3. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	terpeliharanya peralatan gedung kantor	100%	12 bulan	100%	1.000.000	12 bulan 500.000		12 bulan 1.000.000		12 bulan 1.000.000	12 bulan	1.500.000	12 bulan	1.500.000	
		<b>E. Program peningkatan disiplin aparatur</b>	meningkatnya disiplin aparatur dalam pemakaian seragam				0	2.400.000		0		3.000.000		0		3.300.000	
		1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	tersedianya seragam pegawai KKP	100%	0	0%	0	12 org 2.400.000		0	0	12 org 3.000.000		0	0	12 org 3.300.000	

## BAB VI.

### INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD, dalam hal ini adalah Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung, dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung menetapkan 10 (sepuluh) indikator kinerja, yang seluruhnya mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Kesepuluh indikator kinerja tersebut adalah :

- a. Cakupan Ketersediaan Energi per Kapita
- b. Cakupan Ketersediaan protein per Kapita
- c. Peningkatan cadangan pangan masyarakat
- d. Persentase penguatan cadangan pangan pemerintah
- e. Cakupan Penanganan Kerawanan Pangan
- f. Persentase Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan
- g. Cakupan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan
- h. Besaran Desa Mandiri Pangan
- i. Besaran percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan
- j. Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga, dan Akses Pangan

Tabel.18. Indikator Kinerja Kantor Ketahanan Pangan yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi inerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Cakupan Ketersediaan Energi per Kapita	2.846,55	2.794,62	2.800,00	2.850,00	2.900,00	2.980,00	2.980,00
2	Cakupan Ketersediaan protein per Kapita	74,99	70,88	73,54	74,04	74,54	75,44	75,44
3	Peningkatan Cadangan Pangan Masyarakat	29 unit	21%	23%	23%	23%	23%	23%

<b>4</b>	Persentase penguatan cadangan pangan Pemerintah	2,60%	8,80%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
<b>5</b>	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	100%	0,00%	60,00%	60,00%	75,00%	85,00%	85,00%
<b>6</b>	Meningkatnya Persentase Skor Pola Pangan Harapan	88,00%	88,50%	89,00%	89,50%	90,00%	90,85%	90,85%
<b>7</b>	Cakupan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	-	-	80,00%	80,00%	85,00%	90,00%	90,00%
<b>8</b>	Besaran Desa Mandiri Pangan	8	8	8	9	9	10	10
<b>9</b>	Besaran percepatan penganekaragaman konsumsi pangan	0	2	3	4	4	5	5
<b>10</b>	Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga, dan Akses Pangan	66,67%	66,67%	70,00%	90,00%	95,00%	100,00%	100,00%

## BAB VII

### P E N U T U P

Tujuan akhir pembangunan ketahanan pangan adalah meningkatnya ketahanan daerah Kabupaten Temanggung. Kondisi ketahanan pangan, sebagaimana dalam Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, hanya dapat dicapai dengan sinergitas seluruh aspek pendukungnya, mulai dari ketersediaan pangan, distribusi, sampai dengan pemanfaatan atau konsumsi pangan, dimana banyak faktor dan unsur terkait di dalamnya. Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung, sebagai satuan kerja pemerintah daerah, secara kelembagaan mempunyai tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pembangunan urusan ketahanan pangan, terutama dalam kedudukannya sebagai sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung. Koordinasi yang mantab, serta analisa situasi dan kondisi ketahanan pangan secara cermat, diharapkan mampu menghasilkan rumusan kebijakan pembangunan ketahanan pangan yang tepat sasaran.

Rumusan kebijakan pembangunan ketahanan pangan yang tertuang dalam Rencana strategis Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung tahun 2013 – 2018 ini disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung tahun 2013 – 2018, mendukung visi Kabupaten Temanggung yakni *“Terwujudnya Temanggung sebagai Daerah Agraris Berwawasan Lingkungan, Bermasyarakat Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera dengan Pemerintahan yang Bersih”*, sebagai pedoman penyusunan rencana kerja (Renja) SKPD Kantor Ketahanan Pangan selama kurun waktu 5 tahun.

Pembangunan ketahanan pangan didasarkan pada potensi lokal Kabupaten Temanggung, bersifat dinamis dan fleksibel, sesuai situasi dan isu strategis yang ada, guna menjawab permasalahan dan tantangan selama periode Renstra, dengan tetap berpegang pada peraturan perundangan yang berlaku. Oleh sebab itu, terhadap Renstra Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung tahun 2013 – 2018 ini apabila dirasa perlu dapat dilakukan evaluasi, dan dapat ditinjau kembali.

Temanggung,      April 2014

Plt. KEPALA KANTOR KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan

**Ir. C. MASRIK AMIN ZUHDI, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19611121 198703 1 006